

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-4 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT KARYA DELTA PERMAI
- Tanggal Audit : 3 - 9 Februari 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpn : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit)
b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut. (Auditor PHPL Produksi)
c) Hartati Saat, S.Si. (Auditor PHPL Ekologi)
d) Ir. M. Nurul Anwar (Auditor PHPL Sosial)
e) Ir. Syamsul Fikar (Auditor Sosial-Magang)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA DELTA PERMAI
2. Alamat Kantor : Jl. Soetoyo S. No. 196 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan No. 429/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Oktober 2004
: Addendum :
SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.53/MENLHK/
SETJEN/HPL.0/1/2019 Tanggal 17 Januari 2019
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 85.950 Hektar
di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
Setiyo Nuswantoro (Direktur)
Komisaris :
Yoseph Prawira (Komisaris)
7. Nama dan Email MR Auditee : Paimun
kdpbanjarmasin@yahoo.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-PHPL

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
Waktu : Rabu, 3 Februari 2021
Tempat : Palangkaraya
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan
Catatan : BPHP Wilayah X Palangkaraya.
b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Karya Delta Permai.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
Waktu : Kamis, 4 Februari 2021
Tempat : Base Camp Briwit PT Karya Delta Permai
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Karya Delta Permai.
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Waktu : 4 – 8 Februari 2021
Tempat : Base Camp dan Areal PT Karya Delta Permai
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai
Catatan : Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
c) Penilaian dilakukan melalui verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap dokumen dan kegiatan di lapangan sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier.
d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pengambilan sample fisik atau lokasi kegiatan.
e) Hasil verifikasi, analisis kesesuaian dan nilai verifier yang diberikan, dicatat menggunakan form P01-3.12.a-d dan P01-4b.09a.

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
Waktu : Senin, 8 Februari 2021
Tempat : Base Camp PT Karya Delta Permai
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Karya Delta Permai.
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
c) Rapat pertemuan penutupan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.15 Rev.1 13/1/2021

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
Waktu : Selasa, 9 Februari 2021
Tempat : Palangkaraya
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan
Catatan : BPHP Wilayah X Palangkaraya.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
Waktu : Senin, 1 Maret 2021
Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
Ringkasan : Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim
Catatan : Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL pada PT Karya Delta Permai, sebagai berikut:
a) PT Karya Delta Permai dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-PHPL PT Karya Delta Permai dipertahankan dengan :
- masa berlaku 6 (enam) tahun dihitung tanggal 31 Maret 2017 s.d. 30 Maret 2023 (berubah); dan
- pelaksanaan penilikan S-PHPL ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali (tetap).

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.1.1 | : | Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). |
| | Bobot | : | Co-Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Ketersediaan dokumen legal PT Karya Delta Permai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. IUPHHK-HA Nomor : 429/ Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ±79.400 Ha dan lampiran peta skala 1 : 100.000 di Kelompok Hutan Sungai Murung - Sungai Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku sejak tanggal diterbitkan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun 2. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 429/ Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Karya Delta Permai atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.400 (Tujuh puluh Sembilan Ribu Empat ratus) Hektar di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. <p>SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 menyebutkan ketentuan-ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas areal berubah dari ± 79.400 Ha menjadi ± 85.950 Ha, terdiri atas <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 75.720 Ha - Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 8.580 Ha - Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.650 Ha. b. PT Karya Delta Permai diwajibkan menerapkan Sistem Silvikultur Intensif pada areal kerjanya guna optimalisasi produksi kayu c. SK IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai No. SK.429/Menhut-II/2014 tanggal 19 Oktober 2004 dan peta lampirannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. <p>Ketersediaan Dokumen Administrasi Tata Batas :</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di mana PT Karya Delta Permai mengacu pada luas areal terbaru berdasarkan SK addendum IUPHHK-HA No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 diverifikasi telah melakukan tata batas pada arealnya dengan realisasi sebesar 140 Km atau sebesar 54,48% dari target tata batasnya sepanjang 257 Km. Dokumen administrasi tata batas PT karya Delta Permai tersedia sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 108/PB/IUPHHK-HA/2008 tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putra di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pedoman TBT telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dr. Ir. Dwi Sudharto, M. Si NIP 19591117.198603.1.003 pada tanggal 26 Agustus 2008.2. Instruksi Kerja Tata Batas No. INST.127/VII/BPKHV-3/2011 tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putra di Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah telah ditandatangani oleh Kepala BPKH Ir. Zahari H. Sipayung NIP 19600512 198903.1.002 pada tanggal 20 Juli 20113. BAP pelaksanaan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putra di Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah tanggal 29 Januari 2012 telah ditandatangani oleh para pihak.4. Terdapat peta kerja tata batas sendiri dan persekutuan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo PT Barito Putra Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Peta skala 1 : 100.000 dan telah ditandatangani oleh Direktur PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putra dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Dirjen Planologi Kehutanan Dr. Ir. Dwi Sudharto, M. Si. NIP : 19591117.198603.1.003.5. Laporan TBT masih dalam proses pengesahan sesuai dengan surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru No. S.1021/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penyampaian laporan hasil pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, PT Menoreh Loggingindo dan PT Barito Putra, di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Di Basecamp PT Karya Delta Permai terdapat Draft Laporan TBT yang belum ditandatangani dan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan. <p>Dokumen administrasi tata batas di kantor basecamp lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</p> |
|--|--|--|

| 2. | Verifier 1.1.2 | : | Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|------|-------|--------------------|----|--------|------------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|------|-------|---|------------|--|--|--|--|--|---|---------------|--------|--------|---|---|--------------------|---|---------------|--------|--------|---|---|--------------------|---|-------------------|--|--|--|--|--|---|------------------------|--------|--------|---|---|--------------------|---|------------------|--------|--------|---|---|--------------------|---|---------------|-------|-------|---|---|--------------------|---|-----|--------|--------|---|---|--------------------|
| | Bobot | : | Dominan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai | : | SEDANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada SK IUPHHK No. 429/ Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha sebelumnya, realisasi penataan batas PT Karya Delta Permai telah TEMU GELANG (100%) dengan realisasi panjang batas di lapangan sepanjang 174.909 meter dan dokumen laporan TBT sedang dalam proses pengesahan. Namun demikian setelah terdapat addendum SK IUPPHK-HA sesuai dengan SK No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019, maka luas areal PT Karya Delta Permai bertambah menjadi seluas ± 85.950 Ha dan tata batas areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai menjadi terbuka lagi (Tidak Temu Gelang) dengan sisa target yang belum ditata batas sepanjang ± 117.000 meter pada areal penambahan seluas ± 6.550 Ha dan Kawasan Buffer Zone Hutan Lindung Gunung Lampuyat.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen BAP Tata Batas yang telah dilakukan dan peta realisasi tata batas dengan memperhitungkan panjang batas areal sesuai dengan peta lampiran SK IUPHHK-HA No SK.53/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 serta peta lampiran dokumen RKUPHHK-HA periode 2021 – 2030 diketahui bahwa PT Karya Delta Permai telah melakukan tata batas pada arealnya dengan realisasi sepanjang 140 Km atau sebesar 54,48% dari target tata batas keseluruhan sepanjang 257 Km. Mengacu kepada hasil realisasi penataan batas yang tertuang dalam dokumen BAP Tata Batas tanggal 29 Januari 2012 yang telah ditandatangani oleh para pihak, maka kondisi penataan batas PT Karya Delta Permai sebagai berikut:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="4">Panjang Tata Batas (m)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Target TBT</th> <th>Realisasi</th> <th>Sisa</th> <th>%Sisa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batas Alam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Sungai Barito</td> <td>21.510</td> <td>21.510</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BAP TBT 29/01/2012</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Sungai Murung</td> <td>20.700</td> <td>20.700</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BAP TBT 29/01/2012</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batas Persekutuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>PT Menoreh Loggingindo</td> <td>29.928</td> <td>29.928</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BAP TBT 29/01/2012</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>PT Barito Putera</td> <td>19.480</td> <td>19.480</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BAP TBT 29/01/2012</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>HL Gn Bundang</td> <td>6.830</td> <td>6.830</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BAP TBT 29/01/2012</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>HPT</td> <td>10.460</td> <td>10.460</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>BAP TBT 29/01/2012</td> </tr> </tbody> </table> | | | | No | Uraian | Panjang Tata Batas (m) | | | | Keterangan | Target TBT | Realisasi | Sisa | %Sisa | 1 | Batas Alam | | | | | | a | Sungai Barito | 21.510 | 21.510 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | b | Sungai Murung | 20.700 | 20.700 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | 2 | Batas Persekutuan | | | | | | a | PT Menoreh Loggingindo | 29.928 | 29.928 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | b | PT Barito Putera | 19.480 | 19.480 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | c | HL Gn Bundang | 6.830 | 6.830 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | d | HPT | 10.460 | 10.460 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 |
| No | Uraian | Panjang Tata Batas (m) | | | | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Target TBT | Realisasi | Sisa | %Sisa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Batas Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Sungai Barito | 21.510 | 21.510 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Sungai Murung | 20.700 | 20.700 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Batas Persekutuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | PT Menoreh Loggingindo | 29.928 | 29.928 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | PT Barito Putera | 19.480 | 19.480 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | HL Gn Bundang | 6.830 | 6.830 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | HPT | 10.460 | 10.460 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|
| e | HPK/HP/HPT | 31.092 | 31.092 | 0 | 0 | BAP TBT 29/01/2012 |
| f | HPT Eks PT Dacrydium | 49.000 | 0 | 49.000 | 19,06 | |
| g | HL Lampuyat | 68.000 | 0 | 68.000 | 26,46 | |
| | Jumlah | 257.000 | 140.000 | 117.000 | 45,52 | |

Sumber : BAP TBT PT KDP 2012;

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 3. | Verifier 1.1.3 | : | Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai tidak terdapat konflik terkait batas dan overlapping dengan pihak lain, namun di lapangan diketahui adanya kegiatan perladangan masyarakat di sepanjang jalan utama angkutan kayu yang digunakan oleh masyarakat sekitar IUPHHK-HA untuk melakukan perladangan berupa penanaman padi dan tanaman semusim serta sebagian ditanami jenis karet. PT Karya Delta Permai telah melakukan identifikasi pada jalur sepanjang jalan angkutan dengan hasil identifikasi perladangan seluas 103 Ha yang dilakukan oleh 90 orang.</p> <p>Kegiatan identifikasi ini masih belum dilakukan secara menyeluruh mengingat masih banyak kegiatan lain yang dapat menimbulkan konflik seperti kegiatan masyarakat yang mencari emas maupun perladangan pada lokasi lainnya di dalam areal PT Karya Delta Permai yang belum teridentifikasi.</p> |
| 4. | Verifier 1.1.4 | : | Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). |
| | Bobot | : | Co-Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari seluas 79.400 Ha menjadi seluas ±85.950 Ha berdasarkan SK IUPHHK-HA No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 sebelumnya masih belum ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen perencanaan, dan pada periode audit penilikan ke-4 (keempat) atas perubahan luas areal tersebut, PT Karya Delta Permai sudah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 yang sudah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020.</p> |
| 5. | Verifier 1.1.5 | : | Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). |
| | Bobot | : | Co-Dominan |

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| | Nilai | : SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa penggunaan lahan untuk perladangan masyarakat di sepanjang jalan utama angkutan logging. Terdapat upaya dari PT Karya Delta Permai untuk mendata dan mengidentifikasi penggunaan areal di luar sektor kehutanan khususnya pada kegiatan perladangan di sepanjang jalan angkutan logging namun belum seluruhnya. Data identifikasi perladangan masyarakat di sepanjang jalan angkutan logging sejumlah 204 orang dengan luas 378 Ha sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sejak tahun 2015 – 2018 sebanyak 114 Orang dengan luas areal mencapai 275 Ha. 2. Identifikasi tahun 2019 sebanyak 90 Orang dengan luas areal mencapai 103 Ha. 3. Identifikasi tahun 2020 belum dilakukan. <p>PT Karya Delta Permai memiliki dokumen penggunaan areal di luar IUPHHK-HA berupa identifikasi penggunaan lahan oleh masyarakat untuk perladangan, perkebunan, pertanian, dan pemukiman. Identifikasi telah dilakukan setiap tahun, namun belum dilakukan secara menyeluruh dan belum dilaporkan.</p> |
| 6. | Verifier 1.1.6 | Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK |
| | Bobot | Dominan |
| | Nilai | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Selama periode audit pemilikan ke-4 di areal PT Karya Delta Permai diketahui tidak terjadi konflik tenurial berupa tumpang tindih izin dan overlapping batas areal IUPHHK-HA. Di lapangan yang terjadi adalah adanya perambahan/ okupasi atau penggunaan lahan untuk perladangan/ perkebunan dan pemukiman oleh masyarakat dan kelompok masyarakat dengan luas hasil identifikasi sebesar ± 378 Ha sesuai dengan hasil identifikasi yang dilakukan, walaupun belum seluruhnya teridentifikasi.</p> <p>Luas areal PT Karya Delta Permai sesuai dengan SK IUPHHK-HA No. SK.53/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 seluas ± 85.950 Ha. Dari Luasan tersebut terdiri dari kawasan lindung seluas 12.274 Ha, Kawasan tidak efektif untuk produksi seluas 8.455 Ha, dan Kawasan efektif untuk produksi seluas 65.221 Ha.</p> <p>Pada areal yang tidak efektif untuk produksi terdapat areal kebun karet masyarakat seluas 7.400 Ha dan identifikasi perladangan masyarakat di sepanjang jalan angkutan kayu seluas 378 Ha sehingga total penguasaan lahan oleh masyarakat seluas 7.778 Ha atau sebesar 9,00%. Selain areal tersebut sebesar 91% masih dalam penguasaan lahan untuk dikelola oleh PT Karya Delta Permai.</p> |
| | Nilai Kinerja Indikator 1.1 | : BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk. |

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 1.2.1 | : | Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan |
| | Bobot | : | Co-Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Karya Delta Permai No. 01/SK/Dir-KDP/I/2010 tanggal 2 Januari 2010. Dokumen Visi dan Misi PT Karya Delta Permai juga terdapat pada Bab I dokumen RKUPHHK-HA yang disahkan sesuai dengan SK MenLHK No. SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020. Hasil verifikasi dokumen Visi dan Misi PT Karya Delta Permai telah sesuai dengan kerangka PHPL di mana terdapat kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial.</p> <p>Visi dan Misi PT Karya Delta Permai telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi tanggal 20 Januari 2020 dan tanggal 25 Januari 2021 serta pemasangan banner di kantor dan basecamp serta camp produksi.</p> <p>Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi visi dan misi tanggal 22 Januari 2020, BAP sosialisasi tanggal 30 Agustus 2020, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa Takajung, Desa Olung Balo, Desa Muara Joloy, Desa Osom Tompok dan Desa Mantiat Pari dan masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadirnya dan foto dokumentasi.</p> |
| 2. | Verifier 1.2.2 | : | Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Implementasi visi dan misi PT Karya Delta Permai belum seluruhnya dilakukan di antaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi Melaksanakan Pengelolaan Hutan Dengan Mendasari Semua Peraturan dan Hukum Yang Berlaku dan Memperhatikan Kaidah-Kaidah Konservasi, Baik Fungsi Lindung Maupun Kaidah High Conservation Value Forest (HCVF) belum diimplementasikan seluruhnya seperti : a. Penataan batas belum seluruhnya; b. Belum dilakukan studi HCVF; c. Penataan dan pengelolaan Kawasan Lindung masih belum seluruhnya, masih terdapat gangguan pada areal konservasi. 2. Misi untuk Menyusun dan Berpedoman Pada Rencana Pengelolaan Hutan, Baik RKUPHHK Maupun RKTUPHHK Hutan Alam Serta Rencana Pemantauan (RPL) Dan Pengelolaan Lingkungan (RKL) Yang Sesuai Dengan Tuntutan Pengelolaan Hutan Lestari belum diimplementasikan seluruhnya seperti pelaksanaan kelola lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL masih belum sepenuhnya dilakukan. 3. Misi Mengoptimalkan Pemanfaatan Berbagai Produk dan Jasa Dari Hutan Secara Efektif Untuk Menjamin Kestimbangan Fungsi |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | | <p>Ekonomi dan Bermanfaat Lingkungan Hidup dan Sosial Masyarakat belum diimplementasikan seluruhnya seperti pencapaian target produksi baru mencapai 57,44%. Pemanfaatan jasa dari hutan belum diimplementasikan dan pemanfaatan HHBK tidak diinventarisasi.</p> <p>4. Misi Mengelola Keanekaragaman Hayati, Baik Hutan Dilihat Dari Sisi Vegetasi, Sumber Daya Air, Tanah, Ekosistem Yang Unit dan Rawan Sera Bentang Alam Yang Lebar Sehingga Akan Mampu Menjaga Fungsi-Fungsi Ekologi Hutan Secara Integral belum diimplementasikan sebagaimana hasil verifikasi pada aspek ekologi.</p> <p>5. Misi Menyeleraskan dan Mengakui Secara Hukum Hak Ulayat dan Hak Guna Jangka Panjang Atas Sumberdaya Lahan dan Hutan, belum diimplementasikan secara hukum atas hak ulayat di wilayah IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai.</p> <p>6. Pengakuan secara hukum atas hak legal dan hak adat masyarakat belum diimplementasikan dan;</p> <p>7. Fungsi pengawasan dilakukan dalam kegiatan perlindungan dan pengawasan hutan secara Preemtin, Preventif dan Represif yaitu dengan melakukan sosialisasi, pencegahan dan tindakan pengamanan pada semua bagian. Secara intern kegiatan pengawasan juga dilakukan dengan membuat pengawasan yang dilakukan oleh Internal Auditor. Realisasi dari kegiatan tersebut masih dirasakan belum berjalan dengan baik dan efektif penerapannya di lapangan.</p> |
| Nilai Kinerja Indikator 1.2 | : | SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

| | | | |
|-----------|------------------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.3.1 | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan |
| | Bobot | : | Co-Dominan |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Ganis PHPL PT Karya Delta Permai belum direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dan simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari, dan terdapat jumlah yang lebih pada kompetensi Ganis Canhut di mana simpul kegiatan perencanaan terbagi pada kegiatan inventarisasi/ cruising dan kegiatan penataan areal kerja serta penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya di lapangan.</p> <p>Di samping itu pada simpul penatausahaan kayu terdapat Ganis PKB yang berada di wilayah BPHP IX Banjarbaru untuk mengelola dan menandatangani dokumen tata usaha kayu pada TPK yang berada di wilayah Kalimantan Selatan.</p> |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | Data dan informasi Ganis PHPL PT Karya Delta Permai sudah diunggah ke dalam sistem informasi Ganis (SIGANISHUT) dan pada saat audit masih dalam proses verifikasi dari BPHP Wilayah X Palangkaraya. Untuk melengkapi kekurangan Ganis PHPL tersebut PT Karya Delta Permai memiliki Sarjana Kehutanan pada berbagai jabatan yang ada seperti Manager Camp dan Bagian Perencanaan. |
| 2. | Verifier 1.3.2 | : | Peningkatan kompetensi SDM |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Peningkatan kompetensi karyawan PT Karya Delta Permai dengan melakukan pelatihan kepada karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya. Selama periode audit PT Karya Delta Permai telah merencanakan kegiatan pelatihan sebanyak 6 orang dan merealisasikan sebanyak 4 orang atau sebesar 66,67% berupa penyegaran Ganis PHPL dan pelatihan SIPUHH Online. |
| 3. | Verifier 1.3.3 | : | Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan. |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Karya Delta Permai selama Periode Audit Penilikan Ke-4 (Keempat) dinilai tersedia lengkap dan PT Karya Delta Permai telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT KDP sesuai Surat Edaran Direktur Utama tanggal 09 Januari 2019 No. 007/KDP-BC/Se-I/2019. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KABUPATEN Murung Raya serta diimplementasikan. 3. Terdapat dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan 4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan. |
| Nilai Kinerja Indikator 1.2 | : | SEDANG dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk | |

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.4.1 | : | Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Struktur Organisasi PT Karya Delta Permai telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No SK.09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dan terdapat Bagan Struktur Organisasi dengan nama-nama pejabat yang telah diisi pada masing-masing jabatan dengan pembaruan pada lampiran SK berupa bagan struktur organisasi sesuai dengan pengisian personil terakhir.</p> <p>Terdapat pemisahan antara bagian perencanaan, bagian pembinaan hutan, bagian produksi dan bagian pendukung operasional. Pada masing-masing SK tentang Struktur Organisasi dilengkapi dengan job description yang mengatur tentang persyaratan dan tugas serta tanggungjawab pada setiap jabatannya.</p> |
| 2. | Verifier 1.4.2 | : | Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Kondisi peralatan SIM PT KDP mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data. Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat dengan peralatan dan SDM yang cukup memadai.</p> <p>Terdapat SK Camp Manager No 42/SK/CM/KDP-BC/X/ 2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Karyawan pada Lingkup PT Karya Delta Permai yang mengangkat Sdr. Ihwani, S.Hut. sebagai pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada PT Karya Delta Permai yang berkedudukan di Briwit Camp Km 70.</p> <p>SK Direktur PT Karya Delta Permai No. 08/SK/DIR/KDP-BJM/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Penugasan Karyawan pada lingkup PT Karya Delta Permai yang menugaskan Sdr. Suharno dan Suhandi Saputra Sebagai Operator SIPUHH Online PT Karya Delta Permai.</p> <p>Terdapat peralatan SIM di PT Karya Delta Permai yang digunakan untuk melakukan komunikasi, pengiriman data dan informasi beserta tenaga pelaksananya.</p> <p>Hasil pengecekan peralatan SIM di Basecamp Briwit menunjukkan bahwa Keberadaan peralatan SIM dapat diverifikasi dan terdapat tenaga pelaksana untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Pada masing-masing bagian terdapat peralatan computer/ laptop yang digunakan untuk bekerja dan mengolah data lapangan, sedangkan untuk komunikasi terdapat Radio pada masing-masing kendaraan dan pengawas di lapangan yang menyambung ke kantor/ basecamp</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 3. | Verifier 1.4.3 | : | Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM Kementerian sesuai dengan SK Manager Camp PT Karya Delta Permai Nomor 029/KDP-BC/SK-II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukkan tenaga operator sebagai berikut :</p> <p>a. Abdul Kadir dengan Jabatan Perencanaan ditunjuk sebagai Operator E-Monev dan SIPONGI</p> <p>b. Suhadi Saputra dengan Jabatan TUK ditunjuk sebagai Operator SIPUHH Online dan SIGANISHUT</p> <p>c. Suharno dengan Jabatan TUK ditunjuk sebagai Operator SIPUHH:</p> <p>Hasil pengecekan sistem pelaporan diketahui bahwa terdapat kedisiplinan pelaporan SIM Kementerian LHK seperti terdapat pelaporan E-Monev, SIGANISHUT, dan SIPONGI pada bulan Januari 2021, sedangkan untuk SIPUHH dan SIPNBP PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu dan pembayaran kewajiban PNBP dari hasil produksi kayunya.</p> |
| 4. | Verifier 1.4.4 | : | Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI serta telah melakukan monitoring dan evaluasi pada bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Terdapat temuan audit SPI pada setiap aspek pengelolaan hutan produksi lestari baik operasional maupun non operasional. Kegiatan SPI PT Karya Delta Permai pada tanggal 5 – 10 Juli 2020 dinilai telah efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional.</p> |
| 5. | Verifier 1.4.5 | : | Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Hasil monitoring dan evaluasi SPI tahun 2020 serta tindaklanjutnya diketahui bahwa atas rekomendasi yang disusun telah dibuat rencana tindak lanjut (Action Plan) dan evaluasi dari rencana tindak lanjut ini masih belum disusun, namun diverifikasi bahwa rekomendasi tim SPI di lapangan masih belum seluruhnya ditindaklanjuti sebagaimana diverifikasi pada setiap aspek dalam audit ini di antaranya sebagai berikut :</p> <p>a. Pemeliharaan batas areal yang berbatasan langsung dengan IUPHHK-HA PT Taman Raja dan PT Barito Putra, buffer zone HL Lempuyat, Bumban dan Bondang, memasang Kembali papan nama</p> |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | | <p>larangan dan patok yang rusak, diverifikasi masih belum terdapat bukti tindak lanjut pelaksanaannya.</p> <p>b. Revisi SOP pada berbagai aspek masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Tim SPI</p> <p>c. Penambahan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sarana penanggulangan kebakaran hutan masih belum lengkap</p> <p>d. Penanganan penambang emas liar belum ditindaklanjuti</p> <p>e. Rekrutmen tenaga kelola lingkungan masih belum dilaksanakan tahun ini</p> <p>f. Pelatihan Ganis Nenhut, Ganis Binhut dan Pelatihan Damkarhutla masih belum dilaksanakan</p> |
| Nilai Kinerja Indikator 1.4 | : | BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.5.1 | : | Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya |
| | Bobot | : | Co-Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan RKT selama periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat) PT Karya Delta Permai yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa yang berada di lokasi RKT serta di desa binaan lainnya sejumlah 5 (lima) desa dari 6 (enam) desa binaan atau sebesar 83,33% |
| 2. | Verifier 1.5.2 | : | Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Karya Delta Permai telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak.</p> <p>PT Karya Delta Permai pada periode penilikan ke-4 (keempat) diverifikasi telah melakukan kegiatan sosialisasi dan persetujuan program kelola sosial yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan lainnya sejumlah 5 (lima) desa dari 6 (enam) desa binaan atau sebesar 83,33% sesuai dengan BAP Sosialisasi sebagai berikut :</p> <p>a. BAP Sosialisasi RKT 2020 dan PMDH kepada masyarakat tanggal 15 Januari 2020 di Desa Takajung dan Muara Joloy, terdapat BAP dan lampiran dokumentasi foto-foto pelaksanaan sosialisasi dan yang dihadiri oleh karyawan dan masyarakat serta tokoh masyarakat dan Kepala Desa Takajung dan Kepala Desa Joloi serta aparat dari</p> |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | <p>Koramil dan Babinsa serta masyarakat sesuai daftar hadir sebanyak 28 orang.</p> <p>b. BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2020 dan PMDH tahun 2020 kepada masyarakat tanggal 30 Agustus 2020 yang melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat berkaitan dengan visi, misi, tujuan perusahaan, Blok RKT 2020 dan PMDH PT Karya Delta Permai yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa Takajung, Desa Olung Balo, Desa Muara Joloy, Desa Osom Tompok dan Desa Mantiat Pari dan masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadirnya dan foto dokumentasi</p> |
| 3. | Verifier 1.5.3 | : | Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Areal kawasan lindung PT Karya Delta Permai seluas 12.274 Ha telah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan pengesahan dokumen RKUPHHK-HA dan penetapan SK dari Direksi PT Karya Delta Permai.</p> <p>Jenis dan luas kawasan lindung PT Karya Delta Permai telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan sejumlah 5 (lima) desa dari 6 (enam) desa binaan atau sebesar 83,33%.</p> |
| Nilai Kinerja Indikator 1.5 | | : | BAIK dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1 | : | Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai mempunyai dokumen RKUPHHK revisi periode 2011-2020 yang sudah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.10/BUHA-2/2015. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015. AN. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan UD. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. Herry Prijono. Dan RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dengan No SK 7531/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020. An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal ttd Dr Ir. Bambang Hendroyono, MM dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan landscaping areal produksi efektif yang</p> |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU |
| 2. | Verifier 2.1.2 | : | Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah melakukan Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai dengan RKUPHHK. Dimana kesesuaian letak dan luas RKT 2020 dengan RKUPHHK periode 2011/2020 (revisi) sebesar 90,44% karena adanya luncuran kegiatan RKT 2019 seluas 200 Ha dan untuk RKT 2021 terdapat kesesuaian letak dan luas sebesar 100%. |
| 3. | Verifier 2.1.3 | : | Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pemeliharaan Batas Blok dan Petak/ <i>compartement</i> kerja dinilai melalui kejelasan penandaan batas blok dan petak di lapangan. Uji petik Kejelasan tanda batas blok dan petak tebangan dilaksanakan melalui observasi lapangan dengan Intensitas sampling sebesar 5% atas implementasi Penataan Areal Kerja PT Karya Delta Permai. Berdasarkan hasil uji petik Tanda batas Blok RKT dan Petak Kerja RKT 2020 dan 2021,seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan baik berupa tanda batas blok RKT berupa plang RKT, Plang Batas petak, rintisan batas blok RKT berupa polet tiga merah pada pohon dan rintisan batas petak berupa tanda polet merah dua pada pohon. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.1 | | : | BAIK dengan nilai mencapai $16/18 \times 100 \% = 88,89 \%$, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.2.1 | : | Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem yaitu tipe hujan tropis basah dengan tipe ekologi hutan tanah kering . Terdapat Potensi dari hasil IHMB/hasil ITSP 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising RKTUPHHK-HA Tahun 2019, 2020 dan 2021 didapatkan data potensi volume untuk jenis komersial (diameter >50 cm) secara berturut-turut sebesar 24,62 m ³ /ha, 23,34 m ³ /ha, dan 24,93 m ³ /ha. Dan |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | juga dapat diverifikasi keberadaan Peta Sebaran Pohon skala 1:1.000 memuat jalur cruising dan kontur, dan posisi pohon, untuk Petak 14 L , 14 M ,14 N Blok RKT Tahun 2020 |
| 2. | Verifier 2.2.2 | : | Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk satu tipe ekosistem yaitu hujan tropis basah dengan tipe ekologi hutan tanah kering dan telah dianalisis yaitu pada seri I pada blok RKT 2013 dan pada Seri II pada blok RKT 2011 dan Seri III pada blok RKT 2017, Laporan PUP sudah dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Bogor sesuai dengan bukti pengiriman Surat No. 42/SP/KDP-BC/II/2020 tanggal 10 Februari 2020. . Tetapi hasil analisa riap tegakan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume), penentuan JTT berdasarkan hasil ITSP dengan intensitas 100%. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.2 | | : | BAIK dengan nilai mencapai $10/12 \times 100 \% = 83,33 \%$, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.3.1 | : | Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi belum semua sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau peraturan/ketentuan teknis seperti SOP Pemanenan/Produksi atau ketentuan teknis dan implementasinya baru sebagian yang sesuai dengan SOP, beberapa SOP yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu PAK, ITSP dan Produksi. |
| 2. | Verifier 2.3.2 | : | Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha) yaitu rata.rata sebesar 26,5 pohon/ha berdasarkan uji petik pada petak 15 F dan 16 D Blok RKT 2019 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 3. | Verifier 2.3.3 | : | Tingkat kecukupan potensi permudaan |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) yaitu untuk tingkat tiang sebesar 148 pohon/ha dan untuk tingkat semai sebesar 456 pohon/Ha. |
| 4. | Verifier 2.3.4 | : | Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Not Aplicable (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana Silin telah ada dalam dokumen RKUPHHK, tetapi rencana tapak dan penataan areal sebagai Langkah awal pelaksanaan baru akan dilakukan pada tahun 2022 karena lokasi terletak pada blok RKT 2021 dan baru akan dilakukan kegiatan penebangan pada tahun 2021. |
| 5. | Verifier 2.3.5 | : | Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Not Aplicable (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana Silin telah ada dalam dokumen RKUPHHK, tetapi rencana tapak dan penataan areal sebagai Langkah awal pelaksanaan baru akan dilakukan pada tahun 2022 karena lokasi terletak pada blok RKT 2021 dan baru akan dilakukan kegiatan penebangan pada tahun 2021 |
| Nilai Kinerja Indikator 2.3 | | : | BAIK dengan nilai mencapai $13/15 \times 100 \% = 86,67 \%$, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.4.1 | : | Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SPO/02/Prod-RIL/2010 dibuat tanggal 5 Januari 2010 Revisi Ke 2. Tetapi isinya belum mengacu ke Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman penebaran Teknik pemanenan berdampak rendah (Reduce Impact logging/RIL) pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | |
| 2. | Verifier 2.4.2 | : | Penerapan teknologi ramah lingkungan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai Telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan/sebagian kegiatan hasil atau pengelolaan hutan. Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan maksimal yaitu belum dibutanya peta pohon yang di overlay dengan peta topografi dan jalan sarad dan beberapa Kegiatan Teknik silvikultur belum maksimal seperti kegiatan PAK, ITSP, Pemanenan. |
| 3. | Verifier 2.4.3 | : | Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) $\leq 15\%$ yaitu untuk petak 12 F rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal adalah 14,49% dan untuk petak 13 G rata-rata kerusakan tegakan tinggal adalah 13,58%. |
| 4. | Verifier 2.4.4 | : | Limbah pemanfaatan hutan minimal |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah melakukan Pengamatan Uji Petik Faktor eksploitasi di Areal tebangan RKT 2020 Petak 14 J dari hasil pengamatan uji petik di atas didapat nilai faktor eksploitasi sebesar 82 % dimana Limbah di tempat penebangan sebanyak 21,20 M ³ , terdiri dari limbah pangkal 11,49 M ³ , limbah ujung sebanyak 9,71 M ³ dan limbah di TPn sebanyak 3,02 M ³ , terdiri dari limbah pangkal 1,34 M ³ , limbah ujung 1,68 M ³ , sehingga Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$ |
| Nilai Kinerja Indikator 2.4 | | : | BAIK dengan nilai mencapai $17/21 \times 100\% = 80,95\%$, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.5.1 | : | Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>). |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen RKT 2020 dan 2021 lebih dari 50 % yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | disahkan secara self approval. Beberapa kegiatan yang belum mengacu yaitu kegiatan pemanenan RKT 2020, PWH dan ITSP. Dimana rencana pemanenan tahun 2020 untuk RKU 1795 HA di RKT direncanakan 1995 Ha . Dan Untuk Tahun 2021 Rencana pemanenan telah sesuai dengan RKT dan RKU. |
| 2. | Verifier 2.5.2 | : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang |
| | Bobot | : D |
| | Nilai | : Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi ada yang tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pada penataan blok RKT 2020 yang masih terdapat carry over 2 petak yaitu petak 15 J dan 16 J. |
| 3. | Verifier 2.5.3 | : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) |
| | Bobot | : D |
| | Nilai | : Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan tanda batas Blok RKT dan Petak Kerja RKT 2020 dan 2021,seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan baik berupa tanda batas blok RKT berupa plang RKT, Plang Batas petak, rintisan batas blok RKT berupa polet tiga merah pada pohon dan rintisan batas petak berupa tanda polet merah dua pada pohon beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi Penataan Kawasan lindung belum seluruhnya dilakukan penandaan batas di lapangan . |
| 4. | Verifier 2.5.4 | : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan |
| | Bobot | : D |
| | Nilai | : Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT Karya Delta Permai mempunyai Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis antara 50-70% dari rencana tebangan tahunan yaitu untuk realisasi total 18.610,96 M3 dari target 32.408,33 M3 atau sebesar 57,43 % sedangkan relaisasi perkelompok jenis untuk Kelompok jenis Meranti sebesar 17.820,90 M3 dari rencana 31.320,60 M3 atau 56,90 % dan relaisasi kelompok jenis Rimba campuran sebesar 790,06 m3 dari rencana 1.087,73 M3 atau sebesar 72,63 %.pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Nilai Kinerja Indikator 2.5 | : | SEDANG dengan nilai mencapai $14/21 \times 100\% = 66,67\%$, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |
|------------------------------------|---|---|

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.6.1 | : | Kondisi kesehatan finansial |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 31 desember 2019 oleh Drs. Fahmi Rizani nomor 00221/2.0344/AU.2/01/0540-1/1/IX/2020 tanggal 14 September bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan parameter : Likuiditas >150% yaitu sebesar 365 %, Solvabilitas 100 - 150% yaitu 140,43 % dan nilai , Rentabilitas : positif yaitu sebesar 4,51 %. |
| 2. | Verifier 2.6.2 | : | Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi alokasi dana >80% dimana rencana anggaran sebesar Rp.44.409.160.289 dan terealisasi sebesar Rp. 38.820.831.870 sehingga terealisasi sebesar 85,16% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan tahun 2019 yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan public yaitu Drs Fahmi Rizani. |
| 3. | Verifier 2.6.3 | : | Realisasi alokasi dana yang proporsional |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Buruk (1) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu sebesar 51,09 % merupakan selisih dari prosentase realisasi alokasi dana terbesar pada bidang Pengendalian Kebakaran dan Pengawan Hutan sebesar 111,58% dan yang terendah pada kegiatan pemenuhan kewajiban terhadap negara yaitu sebesar 60,49% |
| 4. | Verifier 2.6.4 | : | Realisasi pendanaan yang lancar |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang (2) |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dapat terlihat dari realisasi dana untuk pengelolaan hutan terealisasi sebesar 85,16% namun beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan PAK dan ITSP tahun 2019 dan 2020 |
| 5. | Verifier 2.6.5 | : | Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik (3) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA \geq 80 % yaitu sebesar 103,16 %. Dimana Kegiatan penelitian dan pembinaan hutan terealisasi sebesar 93,85% dan pengendalian kebakaran dan pengawalan hutan sebesar 111,58 %. |
| 6. | Verifier 2.6.6 | : | Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang (2) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) tahun 2020 adalah 60-80% dari yang direncanakan yaitu 75,62 % . Dengan kualitas penanaman 80 % dan kuantitas penanaman tahun 2020 adalah sebesar 94,75 % dari rencana. Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan meliputi kegiatan pengadaan bibit, penanaman pengayaan, rehabilitasi, pemeliharaan tanaman pengayaan dan rehabilitasi dan kegiatan non TPTI terdiri dari kegiatan penanaman kanan kiri jalan, tanah kosong, pemeliharaan tanaman kanan kiri jalan dan tanah kosong. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.6 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai $16/21 \times 100 \% = 76,19 \%$, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.1.1 | : | Luasan kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK Tahun 2020 Periode 2021-2030. Kondisi biofisik dari kawasan dilindungi telah sesuai. |
| 2. | Verifier 3.1.2 | : | Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 418.169,32 m, dan telah terealisasi hingga Februari 2021 sepanjang 213.117,5 m (50,96 %) |
| 3. | Verifier 3.1.3 | : | Kondisi penutupan kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 11.706,15 ha atau 95,37 % dari total luasan kawasan dilindungi 12.274 ha. |
| 4. | Verifier 3.1.4 | : | Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada seluruh desa binaan. Dari 6 desa binaan, hanya 5 desa binaan yang telah dilakukan sosialisasi. Kegiatan penambang emas liar di kawasan dilindungi Sempadan Sungai Danum Tolum, menunjukkan belum semua pihak (masyarakat) mengakui keberadaan kawasan dilindungi. |
| 5. | Verifier 3.1.5 | : | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi baik itu pemeliharaan, penandaan batas, perbaikan patok, dll secara periodik tiap tahunnya. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.1 | | : | BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

13. Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 3.2.1 | : | Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan belum tersedia sesuai gangguan hutan yang ada. Prosedur pengendalian penambang emas liar belum tersedia. |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 2. | Verifier 3.2.2 | : | Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang-plang kawasan lindung serta plang flora-flora dilindungi. Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. |
| 3. | Verifier 3.2.3 | : | SDM perlindungan hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia SDM perlindungan hutan (RPK dan satpam/security). Kualifikasi RPK dan security belum sesuai ketentuan (Belum memiliki kompetensi/belum Diklat). Jumlah security juga belum sesuai ketentuan. PT KDP juga belum memiliki kerjasama dengan seluruh masyarakat desa binaan untuk dijadikan MPA (Masyarakat Peduli API). |
| 4. | Verifier 3.2.4 | : | Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan perlindungan hutan untuk semua jenis gangguan hutan secara preemptif belum dilakukan untuk perburuan. Secara preventif, dari segi SDM dan peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai ketentuan serta monitoring FDR dan monitoring hama penyakit tanaman belum dilakukan, plang jenis-jenis flora dilindungi juga belum tersedia. Secara represif untuk kegiatan perburuan satwa dilindungi juga belum dilakukan. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.2 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

14. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.3.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum mencakup seluruh dampak. Prosedur untuk pengukuran tinggi muka air sungai, sedimentasi sungai, pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas tanah dan pemantauan biota air belum tersedia. |

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|
| 2. | Verifier 3.3.2 | : | Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air sesuai dengan dokumen rencana Addendum RKL-RPL Tahun 2017. Sarana secara teknik sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik dan ada yang belum tersedia. Secara vegetatif, penanaman telah dilakukan pada eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan pada Blok RKT 2019 yang telah ditinggalkan. |
| 3. | Verifier 3.3.3 | : | SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 3 (tiga) orang, namun hanya 1 (satu) orang yang melakukan kegiatan, sehingga masih banyak kegiatan bidang lingkungan terkait dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan seluruhnya. |
| 4. | Verifier 3.3.4 | : | Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana pengelolaan dampak tanah dan air tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 2017. Kegiatan pengelolaan belum seluruhnya tepat terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, sedimentasi sungai dan kualitas air. |
| 5. | Verifier 3.3.5 | : | Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana kegiatan pemantauan sesuai dengan dokumen perencanaan addendum RKL-RPL tahun 2017. Implementasi pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya dilakukan sesuai yang direncanakan di addendum RKL-RPL tahun 2017, seperti : neraca limbah B3, kualitas tanah, kualitas air sungai, erosi tanah, debit air sungai, tinggi muka air sungai, sedimentasi sungai dan biota air (plankton dan benthos). |
| 6. | Verifier 3.3.6 | : | Dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat indikasi adanya dampak terhadap kualitas air sungai yaitu pada parameter BOD. PT Karya Delta Permai memiliki upaya pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air. |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nilai Kinerja Indikator 3.3 | : | BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |
|------------------------------------|---|--|

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.4.1 | : | Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | SOP identifikasi flora dan fauna yang tersedia, belum mencantumkan acuan/referensi terbaru (PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018) yang digunakan dalam penyusunan SOP. |
| 2. | Verifier 3.4.2 | : | Implementasi kegiatan identifikasi |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan namun hasil identifikasi belum sesuai SOP yang digunakan. Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum menggambarkan secara jelas lokasi kegiatan di kawasan lindung atau pada areal blok petak (Blok RKT). |
| Nilai Kinerja Indikator 3.4 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 3.5.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Prosedur pengelolaan flora tersedia, namun isi prosedur menggambarkan kegiatan pengelolaan yang masih bersifat umum (tidak spesifik terhadap suatu jenis yang dilindungi), melainkan kegiatan identifikasi/inventarisasi serta kegiatan berbasis konservasi. Prosedur juga belum mencantumkan acuan/referensi yang terbaru (PermenLHK |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018) yang digunakan dalam penyusunan prosedur. |
| 2. | Verifier 3.5.2 | : | Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pengelolan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam adendum RKL-RPL tahun 2017. |
| 3. | Verifier 3.5.3 | : | Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Masih ada potensi gangguan terhadap flora dilindungi akibat adanya gangguan perambahan (perladangan), illegal logging dan penambangan emas liar di Sempadan Sungai Danum Tolung. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.5 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.6.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Prosedur pengelolaan fauna tersedia, namun isi prosedur menggambarkan kegiatan pengelolaan yang masih bersifat umum (tidak spesifik terhadap suatu jenis yang dilindungi), melainkan kegiatan identifikasi/inventarisasi serta kegiatan berbasis konservasi. Prosedur juga belum mencantumkan acuan/referensi yang terbaru (PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018) yang digunakan dalam penyusunan prosedur. |
| 2. | Verifier 3.6.2 | : | Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan |
| | Bobot | : | D |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam addendum RKL-RPL tahun 2017. |
| 3. | Verifier 3.6.3 | : | Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat perburuan oleh masyarakat seperti dari jenis Rangkong, Trenggiling dan Landak. Sesuai PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Rangkong dan Trenggiling merupakan satwa dilindungi. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.6 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 4.1.1 | : | Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat seperti dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK (2021), Rencana Operasional (2020-2021) peta sebaran desa. Data yang belum tersedia adalah Daftar Perladangan Masyarakat Tahun 2020, Profil Desa dan Data Sosial Ekonomi masyarakat disekitar areal kerja PT KDP. |
| 2. | Verifier 4.1.2 | : | Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan |
| | Bobot | : | Co Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki Prosedur No. SPO/03/KESOS-DBKK/2010 tentang Delineasi Batas Kawasan dengan Kawasan Komunitas Setempat, revisi ke-2 yang disahkan tanggal 5 Januari 20120 dan Prosedur No. SPO/04/KESOS-MPK/2010 tentang |

| | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| | | | Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, revisi ke-2, yang disahkan tanggal 5 Januari 2010. Prosedur tentang mekanisme konflik belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan-peraturan terbaru terkait dengan resolusi konflik yaitu P.5/2016. |
| 3. | Verifier 4.1.3 | : | Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki Pedoman Kerja Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Pedoman Kerja Pembuatan, Perjanjian Dengan Masyarakat, Pedoman Kerja Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan. |
| 4. | Verifier 4.1.4 | : | Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat |
| | Bobot | : | Co Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki sebagian bukti-bukti tentang luas dan batas Kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan masyarakat. Terdapat areal yang belum ada tata batas pasrtiispatif serta masih ada masyarakat yang menggunakan aktifitas berladang dan tambang di dalam areal kerja PT KDP. |
| 5. | Verifier 4.1.5 | : | Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH |
| | Bobot | : | Co Dominan |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki persetujuan para pihak seperti disetujuinya dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, Surat Pengakuan dan Dukungan dari masyarakat di Blok RKT 2020, yaitu Desa Takajung dan Desa Joloi 1, menyatakan sangat mendukung dan menyetujui keberadaan PT Karya Delta Permai melakukan kegiatan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. |
| | Nilai Kinerja Indikator 4.1 | : | BAIK dengan nilai mencapai 80,95% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 4.2.1 | : | Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT KDP telah memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tanggung sosial kepada masyarakat. SK IUPHHK HA, RKU PHHK HA, RKTUPHHK HA Tahun 2020 dan 2021, dan RO Kelola Sosial dan Laporan Kelola Sosial, dan memiliki laporan RKL-RPL tahun 2020, sehingga dapat menunjukkan dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. |
| 2. | Verifier 4.2.2 | : | Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT KDP telah memiliki mekanisme dalam bentuk standar operasional prosedur SOP masing-masing: No. SPO/02/Kesos-PMDH/2010, No. SOP/03/KESOS-MPPDM/2016, No.SPO/01/Kesos-AMTH/2010, No.SOP/08/KESOS-MDIKPP/2016, No.SOP/09/KESOS-MPGR/2016, dan No.SOP/10/KESOS-MPPSP/2016 yang dijadikan pedoman untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap masyarakat. Mekanisme belum seluruhnya mengacu pada peraturan-peraturan terbaru terkait kegiatan sosial di sektor kehutanan, seperti Permen LHK Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan, dan Permen LHK Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. |
| 3. | Verifier 4.2.3 | : | Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SUDAH |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dan dibuktikan dengan Berita Acara pelaksanaan kegiatan Sosialisasi RKT, PMDH dan Kawasan Lindung kepada perwakilan masyarakat seluruh desa-desa di areal kerja PT KDP Blok RKT 2020. |
| 4. | Verifier 4.2.4 | : | Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terkait hak-hak dasar masyarakat dan hukum adat yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang lengkap seperti BA dan dokumen lainnya. Akumulasi pencapaian Kegiatan Kelola Sosial tahun 2020 mencapai Rp 1.298.850.000 dari Rp 1.544.900.000 yang direncanakan atau sekitar (84,07%) |
| 5. | Verifier 4.2.5 | : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dimuat dalam laporan kelola sosial tahun 2020, BA serah terima seluruh bantuan yang diberikan, dan dimuat dalam laporan RKL-RPL tahun 2020. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.2 | | : BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Verifier 4.3.1 | : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memiliki sebagian data yang terkait dengan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data tahun 2020 yang belum tersedia diantaranya data profile desa yang dapat dijadikan acuan kelola sosial, data pemanfaat HHBK dan data orang yang membuka ladang (peladang) di areal kerja PT KDP. |
| 2. | Verifier 4.3.2 | : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memiliki pedoman kerja SOP yang dapat mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. |
| 3. | Verifier 4.3.3 | : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat |
| | Bobot | : Co Dominan |
| | Nilai | : Baik |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memiliki pedoman kerja SOP yang dapat mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. |
| 4. | Verifier 4.3.4 | : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan nilai mencapai 40,54% (<50%). |
| 5. | Verifier 4.3.5 | : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait distribusi manfaat kepada para pihak yakni pemberian kesempatan masyarakat untuk menjadi kontraktor, supply bahan makanan, dan pembayaran kewajiban pada negara (PSDH, DR, BPJS, PBB, BBN/KB). |
| Nilai Kinerja Indikator 4.3 | | : BAIK dengan nilai mencapai 85,18%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Verifier 4.4.1 | : Tersedianya mekanisme resolusi konflik |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memiliki Prosedur Resolusi Konflik namun belum mengacu ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi dan panduan kerjanya. |
| 2. | Verifier 4.4.2 | : Tersedia peta konflik |
| | Bobot | : Dominan |
| | Nilai | : Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT KDP telah memiliki Peta Rawan Konflik Tahun 2019 Skala 1 : 250.000 yang menggambarkan adanya kegiatan perladangan dan penebangan liar masyarakat di jalan koridor yang membelah areal konsesi, bermula di Desa Mantiat Pari hingga ke Muara Joloi, namun demikian Pemetaan Tambang Ilegal yg berada di areal kerja KDP belum dilakukan. |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 3. | Verifier 4.4.3 | : | Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki kelembagaan resolusi konflik dengan SDM Perusahaan yang bertanggung jawab dalam menangani Resolusi Konflik sudah memadai karena pada masing-masing desa terdapat Humas dari PT Karya Delta Permai yang dapat mengantisipasi apabila terjadi permasalahan dengan masyarakat selain itu juga melibatkan aparat desa dan aparat keamanan. Untuk pendanaan sejauh ini masih dapat dipenuhi sesuai kebutuhan |
| 4. | Verifier 4.4.4 | : | Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik namun belum lengkap seperti tidak tersedianya dokumen plotting untuk klaim lahan adat dan tambang ilegal tahun 2020. Dokumen proses penyelesaian konflik tersebut juga belum dilaporkan kepada Dinas yang membidangi sektor Kehutanan di Provinsi Kalteng. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.4 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 75,00% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 4.5.1 | : | Adanya hubungan industrial |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT KDP telah merealisasikan sebgaiian besar hubungan industrial dengan karyawannya, namun masih terdapat beberapa hal yang masih dalam proses, yaitu proses pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2020-2022, Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara online, dan pembentukan LKS Bipartit. |
| 2. | Verifier 4.5.2 | : | Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki rencana training dan telah terealisasi mencapai 66,673% dengan bukti sertifikat, foto kegiatan dan daftar absen |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 3. | Verifier 4.5.3 | : | Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah memiliki prosedur jenjang karir SOP dan sudah terdapat implementasi pada tahun 2020, berupa penilaian kinerja karyawan dan promosi/ pengangkatan dari karyawan harian menjadi karyawan bulanan. |
| 4. | Verifier 4.5.4 | : | Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya |
| | Bobot | : | Dominan |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sepanjang tahun 2020 PT Karya Delta Permai telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan untuk karyawan, namun belum memiliki Ahli K3 Umum dan struktur P2K3 sebagai organisasi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.5 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

5. NILAI VERIFIER PENYUSUN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : | Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan keberadaan : <ul style="list-style-type: none"> - SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.429/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberian IUPHHK-HA seluas ± 79.400 Ha kepada PT Karya Delta Permai di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA a.n PT Karya Delta Permai skala 1:100.000. - SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 53/MENLHK/SETJEN/PHL.0/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.429/MENHU-II/2004 tentang Pemberian Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam Kepada PT Karya Delta Permai atas Areal Hutan Produksi seluas ± 79.400 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus) Hektar di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai yang merupakan Lampiran SK IUPHHK-HA skala 1:100.000. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | <p>SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 menyebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas areal berubah dari ± 79.400 Ha menjadi ± 85.950 Ha, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 75.720 Ha b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 8.580 Ha c. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.650 Ha 2. PT Karya Delta Permai diwajibkan menerapkan Sistem Silvikultur Intensif pada areal kerjanya guna optimalisasi produksi kayu. 3. SK IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai No. SK.429/Menhut-II/2014 tanggal 19 Oktober 2004 dan peta lampirannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai mendapatkan SPP sebanyak 2 (dua) periode dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periode I atas Pemberian HPH berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran Hak Pengusahaan Hutan Nomor : S.985/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 November 2004 sebesar 8.932.500.000,- (Delapan milyar sembilanratus tigapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) untuk areal seluas 79.400 hektar selama 45 Tahun. - Periode II atas Penambahan Areal IUPHHK-HA berupa SPP luran IUPHHK No. S.469/PHPL/IPHH/HPL.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 1.125.300.000,- untuk areal seluas ± 7.260 Ha. <p>Dapat diverifikasi keberadaan dokumen bukti setor IUPHHK-HA telah dibayar lunas sesuai tagihan SPP IUPH.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2020, dan 2021, serta wawancara terhadap MR diverifikasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ <i>not applicable</i> . |

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | <p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut |
| Nilai | : | Memenuhi |
| Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pada pelaksanaan audit penilikan Ke-4 dapat diverifikasi keberadaan dokumen rencana kerja jangka panjang yang digunakan pada periode audit sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk periode 2011-2020, tahun 2015 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Menteri Kehutanan Nomor SK. 10/BUHA-2/2015 tertanggal 20 Maret 2015.</p> <p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Periode 2021-2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, keberadaan dokumen perencanaan jangka Panjang tersebut merupakan dokumen perencanaan periode berikutnya (2021 – 2030) sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA).</p> <p>Penyusunan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 ini berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan luas areal yang direncanakan telah menyesuaikan dengan luasan terbaru seluas ± 85.950 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 53/MENLHK/SETJEN/ PHL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Karya Delta Permai dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 100.000</p> <p>Pada Audit Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Karya Delta Permai yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Karya Delta Permai melalui SK Nomor : 03/SK/DIR/KDP-PLK/1/2020 tanggal 06 Januari 2020. Terdapat peta RKTUPHHK-HA skala 1:50.000 terdiri atas lembar 1 dan lembar 2, dimana target luas tebangan 1.995 Ha dengan volume kayu bulat 32.408,33 M3 yang berasal dari Sisa Target Blok RKT 2019 (CO) sebesar 2.198,06 M3; PWH sebesar 882,53 M3 dan dari Blok RKT TPTI sebesar 29.327,74 M3. 2) RKTUPHHK-HA Tahun 2021 PT Karya Delta Permai yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Karya Delta Permai melalui SK Nomor : 03/SK/DIR/KDP-PLK/1/2021 tanggal 08 Januari 2021. Terdapat peta RKTUPHHK-HA skala 1:50.000 terdiri atas lembar 1 dan lembar 2, dimana target luas tebangan 2.487 Ha dengan volume kayu bulat 44.077,64 M3 yang berasal dari PWH sebesar 672,32 M3 dan dari Blok RKT TPTI sebesar 43.405,32 M3. <p>PT Karya Delta Permai memiliki personil Ganis PHPL Canhut sebanyak 6 orang yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Paimun dengan nomor register 00982-10/CANHUT/XVIII/2019 berlaku sampai dengan 07 Desember 2022. |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | <p>2) Ihwani, S.Hut dengan nomor register 00851-10/CANHUT/XVIII/2019 berlaku sampai dengan 07 Desember 2022.</p> <p>3) Robby Cahyadi, SE Reg. 01913-10/CANHUT/ XVIII/2018 berlaku sampai dengan 14 Mei 2021.</p> <p>4) Arvil Bolang dengan nomor register 00332-10/CANHUT/XVIII/2018 berlaku sampai dengan 25 Maret 2021.</p> <p>5) Memes dengan nomor register 00333-10/CANHUT/XVIII/2018 berlaku sampai dengan 25 Maret 2021.</p> <p>6) Sugianor dengan nomor register 00334-10/CANHUT/XVIII/2018 berlaku sampai dengan 25 Maret 2021.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. |
| | Nilai | : Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 dapat diverifikasi keberadaan Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 skala 1 : 50.000 lembar 1 dan lembar 2 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Buffer Zone Hutan Lindung, Hutan Prenget serta areal yang dipelihara berupa Kebun Bibit dan Petak Ukur Permanen.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan dengan cat merah di batang pohon yang menjadi batas atau pemasangan plang Kawasan lindung, dengan koordinat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buffer Zone HL yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Lampung terdapat Penandaan Batas berupa cat merah dan Plang Sempadan Sungai sesuai Peta pada koordinat S 00^o 12' 56,8" dan E 114^o 16' 15,9: - Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Terusan, titik koordinat 0^o8'4,782" LS 114^o10'30,642" BT dan Plang Sempadan Sungai sesuai Peta. - KPSL 29Z, titik koordinat 0^o18'40,482" LS 114^o19'38,484" BT terdapat penandaan batas berupa cat. |
| 3 | Verifier 2.1.1.c | : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan |
| | Nilai | : Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi keberadaan Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 skala 1 : 50.000 memuat lokasi Blok Tebangan TPTI / Blok RKTUPHHK-HA dan Petak RKTUPHHK-HA.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan uraian sebagai berikut :</p> <p>1) Penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada koordinat 00^o 10'19,34 S 114^o 11' 32,93" E terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (///) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020.</p> |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| | | <p>2) Penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 pada koordinat 00° 11' 58,5 S 114° 13' 09,6" E terdapat penandaan batas warna merah strip (///) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2021.</p> <p>3) Penandaan Batas Petak Petak 20E 20F CO RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada koordinat 0° 07' 38,08 S; 114° 14' 27,16" E terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020.</p> <p>4) Penandaan Batas Petak Petak 19E 20E CO RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada koordinat 0° 07' 38,08 S; 114° 14' 27,16" E terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020.</p> <p>5) Penandaan Batas Petak 19D 19E CO RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada koordinat 00° 07' 06,48 S; 114° 13' 53,98" E terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020.</p> <p>6) Penandaan Batas Petak 17N 17O RKT Tahun 2021 pada koordinat 00° 12' 30,8 S; 114° 12' 52,0" E terdapat plang petak dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai peta RKT 2021</p> <p>7) Penandaan Batas Petak 16N 16O RKT Tahun 2021 pada koordinat 00° 12' 29,9 S; 114° 12' 26,1" E terdapat plang petak dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai peta RKT 2021</p> |
| 4 | Verifier 2.2.1.a | : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya |
| | Nilai | : Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>: Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk periode 2011-2020, tahun 2015 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Menteri Kehutanan Nomor SK. 10/BUHA-2/2015 tertanggal 20 Maret 2015. Terdapat kelengkapan peta lampiran revisi RKUPHHK-HA periode Tahun 2011-2020.</p> <p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Periode 2021-2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, keberadaan dokumen perencanaan jangka Panjang tersebut merupakan dokumen perencanaan periode berikutnya (2021 – 2030) sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Jangka Pendek (RKTUPHHK-HA).</p> <p>Penyusunan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 ini berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan luas areal yang direncanakan telah menyesuaikan dengan luasan terbaru seluas ± 85.950 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 53/MENLHK/SETJEN/PHL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019.</p> <p>Dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 PT Karya Delta Permai direncanakan pada areal seluas ± 85.950 Ha dengan zonasi areal meliputi Kawasan Lindung seluas ± 12.274 Ha, kawasan tidak efektif untuk produksi seluas ± 8.455 Ha dan kawasan efektif untuk produksi seluas ± 65.221 Ha.</p> |

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| | | | Rencana penebangan periode 2021 – 2030 dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan Etat Luas maksimum ± 20.693 Ha/ 10 tahun dan Etat Volume maksimum ± 674.090,42 M3/ 10 tahun. |
| 5 | Verifier 2.2.1.b | : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri |
| | Nilai | : | Not Applicable |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 diverifikasi bahwa PT Karya Delta Permai merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Karya Delta Permai tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. |

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| 1 | Verifier 3.1.1. | : | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Sadar dengan Register Nomor 00677-10/PKB-R/XVIII/2018 sebagai Penerbit LHP berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 045/DIR-KDP/SK.P2LHP/XII/2018 berlaku sampai dengan 11 Desember 2021.</p> <p>PT Karya Delta Permai telah melakukan operasional penerbitan LHP melalui SIPUHH Online dan selama periode audit (Februari 2020 – Januari 2021) PT Karya Delta Permai telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 yaitu sebanyak 30 set dokumen LHP dengan total sebanyak 5.421 batang dan volume 18.610,96 M³.</p> <p>Adapun realisasi produksi pada RKT Tahun 2020 telah tercapai 18.610,96 M³ (57,43%) dari target sebesar 32.408,33 M³ dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Blok Carry Over telah terealisasi sebesar 438 Batang dengan volume 2.155,23 M3 atau 98,05% dari target sebesar 2.198,06 M3 b) Blok RKT Reguler telah terealisasi 2.983 Batang dengan volume 15.665,36 M3 atau 53,41% dari target sebesar 29.327,74 M3 c) Blok PWH telah terealisasi 2.000 Batang dengan volume 790,37 M3 atau 89,56% dari target sebesar 882,53 M3 <p>Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan dan sesuai dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan</p> |
| 2 | Verifier 3.1.2. | : | <p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar |
| Nilai | : | Memenuhi |
| Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara RKTUPHHK-HA sebagai berikut :</p> <p>a. TPK Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Pengesahan dan Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKT 2021 menetapkan lokasi TPn di dalam blok RKT. - SK TPK Hutan sesuai dengan SK Manager Camp PT Karya Delta Permai No. 07/SK/KDP-BRIWIT/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 pada koordinat S 00⁰ 06' 09" dan E 114⁰ 06' 31"; <p>b. TPK Antara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK TPK Antara Joloi sesuai SK No. 05/SK/DIR/KDP-PLK/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara I Joloi) Kegiatan Pengusahaan Hutan pada PT Karya Delta Permai di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan SK Direksi PT KDP No. 30/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 - TPK Antara Bumban sesuai SK No. 06/SK/DIR/KDP-PLK/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara II Bumban) Kegiatan Pengusahaan Hutan pada PT Karya Delta Permai di Provinsi Kalimantan Tengah dan SK Direksi PT KDP No. 30/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 6 Januari 2021. - TPK Antara Barito Kuala sesuai dengan SK No. 20/DIR-KDP/SK.TPK-Antara/XI/2019 berlokasi di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan SK Direksi No. 351/DIR-KDP/SK.TPK-ANTARA/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan lokasi di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. <p>Petugas penerbit SKSHHK dan P3KB PT Karya Delta Permai sebagai berikut :</p> <p>1) Suhandi Saputra dengan Register Nomor 01863-10/PKB-R/XVIII/2020 ditugaskan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 350/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XI/2020 berlaku sampai dengan 20 November 2023; - Penerbit SKSHHK di TPK Antara Joloi I berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 351/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XI/2020 berlaku sampai dengan 20 November 2023; - Penerbit SKSHHK di TPK Antara Muara Bumban berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 351/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XI/2020 berlaku sampai dengan 20 November 2023; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2) Syahrul Arif dengan Register Nomor : 00448-10/PKB-R/XVIII/2019 ditugaskan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P3KB di TPK Antara Joloi I, berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 21/DIR-KDP/SK-P3KB/I/2020 berlaku sampai dengan 15 Januari 2023; - P3KB di TPK Antara Muara Bumban, berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 21/DIR-KDP/SK-P3KB/I/2020 berlaku sampai dengan 15 Januari 2023; <p>3) Bambang Sumantri dengan Register Nomor 00447-09/PKB-R/XIX/2019 sebagai P3KB di TPK Antara Kalsel berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 23/DIR-KDP/SK.P3KB/XII/2019 berlaku sampai dengan 7 Desember 2022;</p> <p>4) Suharno dengan Register Nomor 00446-09/PKB-R/XIX/2019 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Kalsel berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 24/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XII/2019 berlaku sampai dengan 11 Desember 2023.</p> <p>Selama periode audit (Februari 2020 sampai dengan Januari 2021), PT Karya Delta Permai telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Joloi I sejumlah 19 Set dokumen SKSHHK sejumlah 4.124 Batang dengan volume 22.294,54 M3 2. Dari TPK Hutan penjualan ke perusahaan lain (PT MPP) menuju TPK PT MPP sebanyak 1 (satu) set dokumen SKSHHK No. KB.B.7755983 sejumlah 778 Batang dengan volume 3.930,31 M3 3. Dari TPK Antara Joloi penjualan ke perusahaan lain (PT MPP) menuju TPK PT MPP sebanyak 3 (tiga) set dokumen SKSHHK sejumlah 301 Batang dengan volume 1.654,84 M3 4. Dari TPK Antara Joloi menuju TPK Antara Bumban sebanyak 22 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 6.160 Batang dengan volume 37.096,71 M3 5. Dari TPK Antara Bumban menuju Industri penjualan ke perusahaan lain sebanyak 6 (enam) set dokumen SKSHHK sejumlah 6.401 Batang dengan volume 37.094,43 M3 6. Dari TPK Antara Bumban menuju TPK Antara Tamban/ KALSEL sebanyak 2 (dua) set dokumen SKSHHK sejumlah 2.763 Batang dengan volume 16.398,60 M3 7. Dari TPK Antara Tamban/ KALSEL menuju Industri atau penjualan ke perusahaan lain sebanyak 9 (Sembilan) set dokumen SKSHHK sejumlah 2.763 Batang dengan volume 16.395,60 M3. 8. Di samping itu terdapat pembelian kayu dari PT MPP yang diterima di TPK Antara Joloi I sebanyak 10 (sepuluh) set dokumen SKSHHK sejumlah 2.019 Batang dengan volume 13.669,40 M3 <p>Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa PT Karya Delta Permai memiliki stok kayu sebesar 5.112 Batang dengan volume 17.989,68 M3 dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 3.401 Batang Volume 10.146,27 M3; di TPK Antara sebanyak 1.711 Batang Volume 7.843,41 M3.</p> |
|--|--|---|

| | | | Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang terdapat di TPK Hutan dengan sampling 350 batang. Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu di TPK Hutan Joloi menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,22 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----|----------------------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----|----------------------------|---------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----|----------------------------|---------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|-----|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3. | Verifier 3.1.3.a | : | Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai | : | Memenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Label ecolin warna kuning yang berisi tentang Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner</p> <p>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak terbang, dengan sample sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. PETA K</th> <th rowspan="2">No. BARCODE</th> <th rowspan="2">JENIS</th> <th rowspan="2">KOORDINAT TUNGGUL</th> <th rowspan="2">No LHP dan Tanggal</th> <th colspan="4">Dokumen SKSHHK</th> </tr> <tr> <th>TPK Htm ke TPK Antara</th> <th>TPK ANT JOLOI Ke Bumban</th> <th>TPK Antara Bumban Ke Andil Daham</th> <th>TPK Andil Daham ke Industri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">15J</td> <td rowspan="2">1713402KDP0000000000093811</td> <td rowspan="2">Meranti</td> <td>S00°107,473°</td> <td>21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020</td> <td>KB.B.7578000</td> <td>KB.B.7578524</td> <td>KB.B.7705721</td> <td>KB.B.7745843</td> </tr> <tr> <td>E 114°11'33,63"</td> <td>15-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>21-Dec-20</td> <td>3-Jan-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">15J</td> <td rowspan="2">1713402KDP0000000000094071</td> <td rowspan="2">Meranti</td> <td>S00°107,33°</td> <td>21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020</td> <td>KB.B.7578000</td> <td>KB.B.7578524</td> <td>KB.B.7705721</td> <td>KB.B.7745843</td> </tr> <tr> <td>E 114°11'34,245"</td> <td>15-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>21-Dec-20</td> <td>3-Jan-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">15J</td> <td rowspan="2">1713402KDP0000000000093712</td> <td rowspan="2">Meranti</td> <td>S00°106,05°</td> <td>21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020</td> <td>KB.B.7578000</td> <td>KB.B.7578524</td> <td>KB.B.7705721</td> <td>KB.B.7745843</td> </tr> <tr> <td>E 114°11'40,094"</td> <td>15-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>21-Dec-20</td> <td>3-Jan-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">13J</td> <td rowspan="2">1713402KDP00000000000119138</td> <td rowspan="2">Meranti Merah</td> <td>S00°101,85621°</td> <td>21d/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020</td> <td>KB.B.7578000</td> <td>KB.B.7578524</td> <td>KB.B.7705721</td> <td>KB.B.7745843</td> </tr> <tr> <td>E 114°10'40,20038"</td> <td>15-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>23-Nov-20</td> <td>21-Dec-20</td> <td>3-Jan-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">13J</td> <td rowspan="2">1713402KDP00000000000119106</td> <td rowspan="2">Meranti Putih</td> <td>S00°102,63129°</td> <td>22b/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020</td> <td>KB.B.7685704</td> <td>KB.B.7691104</td> <td>KB.B.7705721</td> <td>KB.B.7745843</td> </tr> <tr> <td>E 114°10'40,28977"</td> <td>15-Nov-20</td> <td>16-Dec-20</td> <td>18-Dec-20</td> <td>21-Dec-20</td> <td>3-Jan-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">13J</td> <td rowspan="2">1713402KDP00000000000119002</td> <td rowspan="2">Meranti Merah</td> <td>S00°102,70574°</td> <td>22b/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020</td> <td>KB.B.7685704</td> <td>KB.B.7691104</td> <td>KB.B.7705721</td> <td>KB.B.7745843</td> </tr> <tr> <td>E 114°10'39,05285"</td> <td>15-Nov-20</td> <td>16-Dec-20</td> <td>18-Dec-20</td> <td>21-Dec-20</td> <td>3-Jan-21</td> </tr> </tbody> </table> | No. | No. PETA K | No. BARCODE | JENIS | KOORDINAT TUNGGUL | No LHP dan Tanggal | Dokumen SKSHHK | | | | TPK Htm ke TPK Antara | TPK ANT JOLOI Ke Bumban | TPK Antara Bumban Ke Andil Daham | TPK Andil Daham ke Industri | 1 | 15J | 1713402KDP0000000000093811 | Meranti | S00°107,473° | 21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | E 114°11'33,63" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | 2 | 15J | 1713402KDP0000000000094071 | Meranti | S00°107,33° | 21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | E 114°11'34,245" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | 3 | 15J | 1713402KDP0000000000093712 | Meranti | S00°106,05° | 21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | E 114°11'40,094" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | 4 | 13J | 1713402KDP00000000000119138 | Meranti Merah | S00°101,85621° | 21d/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | E 114°10'40,20038" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | 5 | 13J | 1713402KDP00000000000119106 | Meranti Putih | S00°102,63129° | 22b/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7685704 | KB.B.7691104 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | E 114°10'40,28977" | 15-Nov-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | 6 | 13J | 1713402KDP00000000000119002 | Meranti Merah | S00°102,70574° | 22b/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7685704 | KB.B.7691104 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | E 114°10'39,05285" | 15-Nov-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | 21-Dec-20 |
| No. | No. PETA K | No. BARCODE | JENIS | | | | | | | KOORDINAT TUNGGUL | No LHP dan Tanggal | Dokumen SKSHHK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TPK Htm ke TPK Antara | TPK ANT JOLOI Ke Bumban | TPK Antara Bumban Ke Andil Daham | TPK Andil Daham ke Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15J | 1713402KDP0000000000093811 | Meranti | S00°107,473° | 21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E 114°11'33,63" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15J | 1713402KDP0000000000094071 | Meranti | S00°107,33° | 21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E 114°11'34,245" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 15J | 1713402KDP0000000000093712 | Meranti | S00°106,05° | 21b/LHP-COKBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E 114°11'40,094" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 13J | 1713402KDP00000000000119138 | Meranti Merah | S00°101,85621° | 21d/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7578000 | KB.B.7578524 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E 114°10'40,20038" | 15-Nov-20 | 23-Nov-20 | 23-Nov-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13J | 1713402KDP00000000000119106 | Meranti Putih | S00°102,63129° | 22b/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7685704 | KB.B.7691104 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E 114°10'40,28977" | 15-Nov-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13J | 1713402KDP00000000000119002 | Meranti Merah | S00°102,70574° | 22b/LHP-REG/KBB/KDP-BRC/XI/2020 | KB.B.7685704 | KB.B.7691104 | KB.B.7705721 | KB.B.7745843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E 114°10'39,05285" | 15-Nov-20 | 16-Dec-20 | 18-Dec-20 | 21-Dec-20 | 3-Jan-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Verifier 3.1.3.b | : | Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai | : | Memenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan pada SIPUHH Online telah terdapat sistem dan mekanisme penandaan kayu sehingga dapat dilacak balak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | <p>Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dapat diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Hutan sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang seperti pada verifier 3.1.3.a.</p> |
| 5. | Verifier 3.1.4 | : | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Selama periode audit (Februari 2020 sampai dengan Januari 2021), PT Karya Delta Permai telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Joloi I sejumlah 19 Set dokumen SKSHHK sejumlah 4.124 Batang dengan volume 22.294,54 M3 - Dari TPK Hutan penjualan ke perusahaan lain (PT MPP) menuju TPK PT MPP sebanyak 1 (satu) set dokumen SKSHHK No. KB.B.7755983 sejumlah 778 Batang dengan volume 3.930,31 M3 - Dari TPK Antara Joloi penjualan ke perusahaan lain (PT MPP) menuju TPK PT MPP sebanyak 3 (tiga) set dokumen SKSHHK sejumlah 301 Batang dengan volume 1.654,84 M3 - Dari TPK Antara Joloi menuju TPK Antara Bumban sebanyak 22 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 6.160 Batang dengan volume 37.096,71 M3 - Dari TPK Antara Bumban menuju Industri penjualan ke perusahaan lain sebanyak 6 (enam) set dokumen SKSHHK sejumlah 6.401 Batang dengan volume 37.094,43 M3 - Dari TPK Antara Bumban menuju TPK Antara Tamban/ KALSEL sebanyak 2 (dua) set dokumen SKSHHK sejumlah 2.763 Batang dengan volume 16.398,60 M3 - Dari TPK Antara Tamban/ KALSEL menuju Industri atau penjualan ke perusahaan lain sebanyak 9 (sembilan) set dokumen SKSHHK sejumlah 2.763 Batang dengan volume 16.395,60 M3. - Di samping itu terdapat pembelian kayu dari PT MPP yang diterima di TPK Antara Joloi I sebanyak 10 (sepuluh) set dokumen SKSHHK sejumlah 2.019 Batang dengan volume 13.669,40 M3. |
| 6. | Verifier 3.2.1.a | : | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan |
| | Nilai | : | Memenuhi |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • DR sebesar US\$ 299.524,51 • PSDH sebesar Rp 1.462.447.220,- |
| 7 | Verifier 3.2.1.b | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran DR sebesar US\$ 299.524,51 • Pembayaran PSDH sebesar Rp 1.462.447.220,- |
| 8 | Verifier 3.2.1.c | : | Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan |
| 9 | Verifier 3.3.1 | : | Dokumen PKAPT |
| | Nilai | : | Not Applicable |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit Penilaian Ke-4 (Februari 2020 s.d. Januari 2021), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan. |
| 10 | Verifier 3.3.2 | : | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. |
| | Nilai | : | Memenuhi |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Karya Delta Permai telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu dengan tujuan ke luar pulau Kalimantan yaitu sebanyak 2 (dua) set dokumen SKSHHK dengan SKSHHK Nomor KB.B.6191214 tanggal 7 Februari 2020 dan SKSHHK Nomor KB.B.6426353 tanggal 24 Maret 2020 dengan tujuan PT Mitra Usaha Raya di Gresik Jawa Timur.</p> <p>Dari 2 (dua) dokumen SKSHHK tersebut diketahui bahwa SKSHHK Nomor KB.B.6191214 tanggal 7 Februari 2020 diangkut menggunakan TK VIRGO 88 dan TB BATARA 8 dan TB BATARA II dengan Nomor SPB 001/UPP.RI/WKJ/IX/2020 sedangkan SKSHHK Nomor KB.B.6426353 tanggal 24 Maret 2020 diangkut menggunakan TK. KBU II dan TB BATARA 8 dan TB BATARA V dengan SPB No. 38/UPP.RI/V/2020.</p> <p>Tersedia dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Karya Delta Permai. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.</p> |
| 11 | Verifier 3.4.1 | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor : 08.SPHPL.019-IDN berlaku selama 5 (lima) Tahun dari tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 07 Maret 2022. Dengan demikian, PT Karya Delta Permai telah memiliki hak untuk menggunakan Logo Tanda V-Legal.</p> <p>Pada Periode Audit Penilaian Ke-4 PHPL PT Karya Delta Permai diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu (Barcode) dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.</p> |

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 4.1.1 | : | Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Dokumen lingkungan PT Karya Delta Permai berupa KA-ANDAL, RE-ANDAL RKL RPL, ANDAL, RKL dan RPL telah disahkan sesuai dengan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah. Surat ditandatangani A/n Menteri Kehutanan dan Perkebunan Sekretaris Jenderal selaku Komisi AMDAL Pusat, Roedjai NIP 080018909.</p> <p>Berdasarkan telaah terhadap dokumen KA-ANDAL, RE-ANDAL RKL RPL, ANDAL, RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai (Eks.</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 1999 diverifikasi bahwa penyusunan AMDAL telah sesuai dengan tata waktunya dan telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Keputusan Dirjen PHPA/ Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 2019/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen ANDAL HPH. |
| 2. | Verifier 4.1.2.a | : | Dokumen RKL dan RPL. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>PT Karya Delta Permai memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai dengan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Dokumen RKL dan RPL PT Karya Delta Permai telah disusun sesuai dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial pada Dokumen Laporan Utama Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan sesuai dengan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> |
| 3. | Verifier 4.1.2.b | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2020 PT Karya Delta Permai dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya sesuai dengan tanda terima dokumen tanggal 3 Juli 2020 diterima oleh Pakhrul Rozi dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Murung Raya.</p> <p>Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2020 PT Karya Delta Permai dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya sesuai dengan tanda terima dokumen tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Pakhrul Rozi dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Murung Raya.</p> <p>Dalam dokumen RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Karya Delta Permai dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan Kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN dan KPSL. - Penanaman bekas jalan sarad, eks TPn, dan kiri kanan jalan. - Pemantauan TMA untuk pengukuran debit air. - Pemantauan Curah hujan. - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | - Pemberian bantuan sosial budaya termasuk honor guru, kepala adat, dan aparat desa. |
|--|--|--|--|

27. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|---|
| 1. | Verifier 5.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Pedoman/ Prosedur K3 tidak mengalami perubahan dengan dengan kondisi PT Karya Delta Permai memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP K3 No. SPO/04/PERSUM-K3/2012, tanggal 14 Pebruari 2012. - SOP Penanganan Medis di Klinik PT Karya Delta Permai - SOP RIL No.SPO/02/PROD-RIL/2010, tgl. 5 Januari 2010, dimana didalamnya tercantum prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 pada kegiatan pembalakan hutan. - SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan No.SPO/16/Keling-PPH/2010. - SOP Pengelolaan Sampah No.SPO/17/Keling-PS/2010. - Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 07/SK-Dir/KDP-Bjm/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penanggung Jawab K3 PT Karya Delta Permai. |
| 2. | Verifier 5.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat daftar peralatan K3 PT Karya Delta Permai yang dibuat oleh Budi Yanto (Ka. Personalia) dan diketahui oleh Ir. Eko Hari Soebagyo (Manager Camp) per Januari 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik terkait keberadaan peralatan K3 di lapangan, diantaranya dijumpai peralatan K3 seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan di Base Camp. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Camp Manahat serta Camp Briwit. - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging. - Terdapat rambu-rambu terkait K3 yang di pasang di tempat-tempat strategis. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 3. | Verifier 5.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Terdapat dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Januari – Desember 2020 yang dibuat oleh Budi Yanto (Ka. Personalia) dan diketahui oleh Ir. Eko Hari Soebagyo (Manager Camp) setiap bulannya. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Karya Delta Permai.</p> <p>PT Karya Delta Permai melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. - Pemasangan papan himbauan K3 - Pemasangan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan LV dan Logging Truck. - Melengkapi Operator Alat Berat berupa HT yang digunakan untuk komunikasi agar terjalin komunikasi dengan baik sehingga meminimalisir kecelakaan. |
| 4. | Verifier 5.2.1 | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Karyawan PT Karya Delta Permai belum membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT KDP sesuai Surat Edaran Direktur Utama tanggal 09 Januari 2019 No. 007/KDP-BC/Se-I/2019 |
| 5. | Verifier 5.2.2 | : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Delta Permai telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya No. KEP/560/43/Disnakertrans tanggal 17 Desember 2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 18 Desember 2020. Pada saat audit penilikan ke-4 Peraturan Perusahaan PT Karya Delta Permai masih dalam proses perpanjangan pendaftaran PP ke Disnakertrans Kabupaten Murung Raya sesuai dengan surat Pimpinan Perusahaan PT Karya Delta Permai No. 009/KDP-BC/Perm-I/2021 tanggal 25 Januari 2021 |
| 6. | Verifier 5.2.3 | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Verifikasi terdapat Laporan Tenaga Kerja PT Karya Delta Permai yang disusun dan dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya diverifikasi bahwa terdapat laporan tanggal 05 Januari 2021 dengan Surat No. 002/KDP-BC/Lap.Tenaker/I/2021. |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Dalam laporan tersebut diketahui bahwa karyawan PT Karya Delta Permai seluruhnya berjumlah 128 orang terdiri dari 127 orang warga negara Indonesia dan 1 (satu) orang tenaga kerja asing berkebangsaan Malaysia dengan nomor passport 571023135047 dan PT Karya Delta Permai tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Hengki Permana dengan jabatan sebagai Pembantu Scaller yang lahir di Cianjur pada tanggal 25 Desember 2002 dan berusia 18 Tahun.</p> |
|--|--|---|

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

| No. | Indikator | Nilai Kinerja Indikator | Nilai Kematangan/ Bobot Indikator | Nilai Kinerja Maksimal Indikator |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1. | 1.1 | BAIK | 3 | 3 |
| 2. | 1.2 | SEDANG | 2 | 3 |
| 3. | 1.3 | SEDANG | 2 | 3 |
| 4. | 1.4 | BAIK | 3 | 3 |
| 5. | 1.5 | BAIK | 3 | 3 |
| 6. | 2.1 | BAIK | 3 | 3 |
| 7. | 2.2 | BAIK | 3 | 3 |
| 8. | 2.3 | BAIK | 3 | 3 |
| 9. | 2.4 | BAIK | 3 | 3 |
| 10. | 2.5 | SEDANG | 2 | 3 |
| 11. | 2.6 | SEDANG | 2 | 3 |
| 12. | 3.1 | BAIK | 3 | 3 |
| 13. | 3.2 | SEDANG | 2 | 3 |
| 14. | 3.3 | SEDANG | 2 | 3 |
| 15. | 3.4 | SEDANG | 2 | 3 |
| 16. | 3.5 | SEDANG | 2 | 3 |
| 17. | 3.6 | SEDANG | 2 | 3 |
| 18. | 4.1 | BAIK | 3 | 3 |
| 19. | 4.2 | BAIK | 3 | 3 |
| 20. | 4.3 | BAIK | 3 | 3 |
| 21. | 4.4 | SEDANG | 2 | 3 |
| 22. | 4.5 | SEDANG | 2 | 3 |
| JUMLAH | | | 55 | 66 |
| TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR | | | 55/66 = 83,33 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk | |